



## Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Melalui Strategi Kampanye Militer dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung

Yudi Rusfiana<sup>1</sup>  
Handoko Nurseta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia

<sup>2</sup>Kepala Staff Korem 084/Bhaskara Jaya, Indonesia

Corresponding Author: [rusfianayoudhy@gmail.com](mailto:rusfianayoudhy@gmail.com)

### Article Info

**Keyword:**  
Keyword 1;  
Synergy  
Keyword 2;  
Military Campaign Strategy  
Keyword 3;  
Disaster Management

**Abstract:** *The synergy of the TNI and local governments in flood management in Bandung Regency has been going on for a long time, the Military Campaign approach is a series of several joint operations carried out to achieve strategic and operational objectives in a specified space and time, the military campaign consists of military operations for war (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). The purpose of this study is to describe and analyze the synergy between the TNI and local governments in flood management in Bandung Regency through a military campaign strategy because it involves TNI units that have different dimensions and functions. The strategy carried out by the TNI (in this case carried out by the Bandung Kodim in flood disaster management operations, including jointly with the Bandung Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) mobilized all TNI forces around the Greater Bandung area including the Combat Engineer Battalion. -3 Dayeuh Kolot, TNI-AU Kopaskhas at Sulaeman Air Base, Lanal Bandung and other regional officials to synergize and assist in carrying out flood disaster relief operations. However, it is suggested that the use of combat power with other institutions / organizations that have different lines and work procedures from the military hierarchy so that it is more coordinated and communicated, especially together with the Regional Disaster Management Agency (BPBD) which needs understanding related to optimizing it in flood management operations referred to*

**Kata Kunci:**  
Kata kunci 1;  
Sinergi  
Kata kunci 2;  
Strategi Kampanye Militer  
Kata kunci 3;  
Penanggulangan Bencana

**Abstrak:** Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung telah berjalan cukup lama, pendekatan Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan, Kampanye militer terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung melalui strategi kampanye militer karena melibatkan satuan TNI yang memiliki matra dan fungsi yang berbeda. Strategi yang dilakukan oleh TNI (dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kodim Bandung pada operasi penanggulangan bencana banjir, diantaranya secara bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menggalang semua kekuatan TNI yang ada di sekitar wilayah Bandung Raya diantaranya Batalyon Zeni Tempur-3 Dayeuh Kolot, Kopaskhas TNI-AU yang berada di Lanud Sulaeman, Lanal Bandung serta aparat kewilayahan lainnya untuk bersinergi dan membantu dalam melaksanakan

---

operasi penanggulangan bencana banjir. Namun demikian disarankan bahwa penggunaan kekuatan tempur dengan institusi/organisasi lain yang memiliki jalur dan tata kerja yang berbeda dari hierarki militer agar lebih terkoordinasi dan terkomunikasikan apalagi bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang perlu pemahaman terkait dengan pengoptimalisasikannya dalam operasi penanggulangan banjir.

---

**Article History: Received 25-Februari-2021, Revised 20-Maret-2021, Accepted: 22-April-2021**

---

## PENDAHULUAN

Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan Banjir sudah lama berlangsung baik pada tahap sebelum bencana/pra bencana, saat bencana/masa bencana, dan setelah bencana/pasca bencana. Sinergi dalam penanggulangan bencana ini terus diingkatkan agar mampu mengurangi resiko bencana, mendeteksi kapan terjadinya bencana, maupun melakukan upaya-upaya mitigasi bencana sedini mungkin. Tanpa adanya sinergi ini, maka penanggulangan bencana alam akan mengalami hambatan. Salah satu sinergi yang harus dioptimalkan secara terus menerus adalah sinergi antara TNI dengan Pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana alam baik di pusat maupun di daerah. TNI sebagai kekuatan pertahanan di Indonesia mengemban misi tidak hanya menangkal, menindak dan menghancurkan musuh semata, melainkan juga mengemban misi sipil (civic mission), berupa membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Indonesia.

Pelaksanaan tugas pokok TNI mengacu pada Undang-Undang RI, Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada tataran operasional, tugas tersebut dijabarkan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dinamika pelaksanaan kedua tugas OMP dan OMSP tersebut dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis pada lingkup internasional, regional dan nasional. Gongora, Thierry and van Riekhoff, Harald (2000) dalam bukunya *Toward a Revolution in Military Affairs Defense and Security at the Dawn of the Twenty First Century* menyatakan “Pada lingkup internasional, ditandai dengan lahirnya apa yang disebut sebagai *RMA (Revolution in Military Affairs* atau Revolusi di Bidang Militer) yang dimotori oleh Amerika Serikat (AS). Bagi AS, *RMA* ini sekaligus menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan militer global yang tak tertandingi oleh kekuatan militer dari negara mana pun”.

Di samping kehadiran *Revolution in Military Affairs* (Revolusi di Bidang Militer), keunggulan kapasitas militer AS, juga dapat dicermati pada Doktrin Gabungan untuk Perencanaan Kampanye. Pada Doktrin ini, meski secara eksplisit tidak langsung menunjuk pada kampanye militer, tetapi pada dasarnya perencanaan sebuah kampanye gabungan mengakomodasikan penggunaan OMSP. Untuk jelasnya, Pada dalam doktrin tersebut antara lain dinyatakan: “Bahwa perencanaan kampanye digunakan untuk mengembangkan rencana kampanye pada masa damai, konflik, atau perang. Dengan kata lain, perencanaan kampanye *selain* digunakan untuk *melaksanakan* operasi tempur, juga dapat diaplikasikan dalam operasi militer selain perang (<http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp.pdf>)”.

Tuntutan pelaksanaan tugas TNI terkait dengan OMSP, terutama untuk tugas-tugas penanggulangan bencana, secara parsial telah diwadahi Peraturan Panglima Nomor /35/XI/2007 tanggal 21 November 2007 tentang pembentukan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulan Bencana (PRCPB). Wadah ini terdiri dari unsur-unsur satuan organik tiap angkatan, yang pada kondisi tertentu dapat diperbantukan pada Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menanggulangi bencana berskala nasional. Pada pelaksanaan tugas di lapangan, dinilai peraturan ini kurang efektif penerapannya, mengingat komando dan pengendaliannya diselenggarakan secara terpusat, yang kedudukannya berada di Mabes TNI. Sementara aneka bencana alam, berupa letusan gunung, tsunami, longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, yang tersebar di seluruh wilayah RI, yang berpotensi mengancam setiap saat, tidak mungkin diatasi hanya dengan pengerahan PRCPB.

Satuan-satuan TNI kewilayahan juga dituntut kesiapannya setiap saat untuk dilibatkan dalam operasi penanggulangan bencana dimaksud. Pada kondisi seperti ini diperlukan pedoman penanggulangan bencana alam bagi setiap satuan TNI, yang secara doktrin merupakan penjabaran dari OMSP berdasarkan UU No 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI pasal 7 ayat 2, khususnya tentang penanggulangan bencana. Pedoman dimaksud belum sepenuhnya ada,

Strategi kampanye militer yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, bagaimana dinamika pelaksanaan pengerahan kekuatan TNI di dalam menanggulangi bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Mabes TNI telah menerbitkan Buku Petunjuk Induk (Bujukin) OMSP yang disahkan melalui peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/14/III/2008. Kondisi ini cukup dilematis karena Doktrin OMSP belum ada tetapi Bujukannya sudah diterbitkan. Kenyataan ini merupakan persoalan yang terjadi pada tataran *policy hierarkhi*, dimana secara teoritis pedoman di lapangan seperti halnya Buku Petunjuk Induk sejatinya didasari oleh kebijakan yang sifatnya filosofis seperti halnya doktrin. Sehingga terjadi loncatan proses *policy hierarkhi* dalam tataran implementatif.

Buku putih pertahanan tahun 2008 yang terkait dengan masalah bencana alam menyatakan bahwa untuk menghadapi Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum, penanggulangan dampak bencana alam. Dimana unsur utama yang bertindak untuk mendinamisasikan kekuatan nasional untuk penanganan pengungsian, pencarian korban, serta usaha-usaha konkret untuk mengatasi dampak bencana serta langkah-langkah rekonstruksi. Berasal dari pertahanan nirmiliter yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana alam dan didukung oleh unsur-unsur lainnya. Lapis pertahanan militer dalam hal keselamatan umum yang menyangkut penanganan dampak bencana alam dengan skala besar adalah menggerakkan TNI sebagai kekuatan yang siap dan digunakan untuk membantu unsur-unsur pertahanan nirmiliter lainnya.

Pelibatan TNI dalam penanganan bencana alam termasuk kerangka kerja OMSP. Termasuk didalamnya penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, kinerja sektor pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang selama ini telah ditunjukkan secara baik. Peran aktif TNI dalam menanggulangi dampak bencana yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia selama ini membuktikan bahwa TNI memiliki kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan untuk tampil sebagai instrumen negara yang diandalkan.

Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2008 secara tersirat menjelaskan “bahwa untuk menghadapi kemungkinan pelibatan TNI dalam tugas-tugas penanggulangan bencana, pemberdayaan kemampuan TNI yang meliputi bidang manajemen, keterampilan prajurit, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan prioritas pemerintah. Dalam bidang manajemen, upaya peningkatan diarahkan pada penataan organisasi, mekanisme kerja, sistem komando dan pengendalian serta hubungan antar departemen/lembaga. Dalam bidang keterampilan prajurit, upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan fungsi dan peran kelembagaan TNI yang mampu membekali prajurit dengan keterampilan yang diperlukan dalam tugas-tugas tersebut. Dalam hal dukungan sarana dan prasarana, pemerintah akan memperlengkapi TNI dengan Alutsista yang menjamin mobilitas TNI serta alat peralatan modern, yang dapat digunakan selain untuk kepentingan pertahanan dalam menghadapi

ancaman militer, juga dapat dimanfaatkan dalam tugas-tugas penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan”.

Hasil pengamatan sementara, secara umum terhadap pengerahan unsur-unsur TNI dalam operasi penanggulangan bencana alam khususnya banjir di wilayah Kabupaten Bandung dimana hampir setiap tahunnya terjadi dan menelan banyak kerugian baik material maupun immaterial. Sebagaimana diketahui terdapat satuan-satuan TNI berada di wilayah Kabupaten Bandung dimaksud yang senantiasa tidak pernah absen dalam operasi penanggulangan bencana banjir diantaranya; Kodim 0609/Bandung Selatan beserta jajarannya, Yon Zipur 3, dan Bekangdam III/Siliwangi. Namun dalam tataran operasional seringkali timbul berbagai persoalan teknis di lapangan, yang dimungkinkan karena tidak adanya teknis pengaturan secara operasional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

**Tabel 1. Keterlibatan Satuan TNI pada Operasi Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Bandung**

No	Satuan	Keterangan
1.	Kodim Kabupaten Bandung TNI AD	Kabupaten Bandung
2.	Lanud Sulaeman TNI AU	Kabupaten Bandung
3.	Paskhas TNI AU	Kabupaten Bandung
4.	Yon Zipur 3 TNI AD	Kabupaten Bandung
5.	Bekangdam III/SLW TNI AD	Kota Bandung
6.	Lanal Bandung TNI Al	Kota Bandung

*Sumber: data diolah peneliti, 2021*

Pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil apabila kondisi di wilayah dan satuan secara kuantitatif bisa didukung dengan data-data kualitatif. Pencapaian sasaran juga mempunyai nilai ukuran atau adanya indikator-indikator misalnya dalam penanggulangan bencana banjir korban bisa diselamatkan dan kehadiran TNI mengakibatkan pencapaian sasaran lebih maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 24 tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1: (5) Bahwa Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Sejauh ini pengerahan kekuatan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana banjir khususnya di wilayah Kabupaten Bandung melibatkan beberapa satuan TNI yang sekiranya sudah menjadi prosedur tetap satuan-satuan mana saja yang harus dikerahkan dalam penanggulangan banjir. Merujuk kepada buku putih pertahanan tahun 2008 bahwa TNI dapat dikerahkan dengan segala kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki dalam penanggulangan bencana alam termasuk bencana banjir. Demikian pula halnya bagaimana pelibatan satuan angkatan bersenjata AS pada saat penanggulangan bencana alam Tsunami tahun 2004 dengan melibatkan personel, sarana dan prasarana pendukungnya merupakan bagian dari perencanaan kampanye militer pada masa damai dalam tugas OMSP.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dimana dalam setiap bencana alam khususnya pada bencana banjir unsur TNI senantiasa dilibatkan dalam bentuk operasi penanggulangan bencana sebagai bentuk sinergi TNI dan Pemerintah Daerah, dapat dirumuskan masalah “Bagaimana Sinergi TNI dan Pemda melalui strategi kampanye militer dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisis Sinergi TNI dan Pemda melalui strategi kampanye militer dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung. Dimana menurut John W. Creswell (2010) pada metode penelitian kualitatif menyatakan bahwa peneliti tidak membawa individu

atau kelompok ke dalam laboratorium, dan tidak pula membagikan instrumen-instrumen kepada mereka. Informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural. Peneliti adalah instrumen kunci karena dia akan mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi perilaku dan melakukan wawancara.

Agus Prastowo. (2012:197) Informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive* yaitu cara memilih informan yang mewakili dalam proses pengumpulan data yang objektif. Teknik pengambilan sampel *purposive* sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah : unsur kodim, batalyon; Pemda (BPBD); dan Tokoh Masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui pendekatan triangulasi data maupun teori.

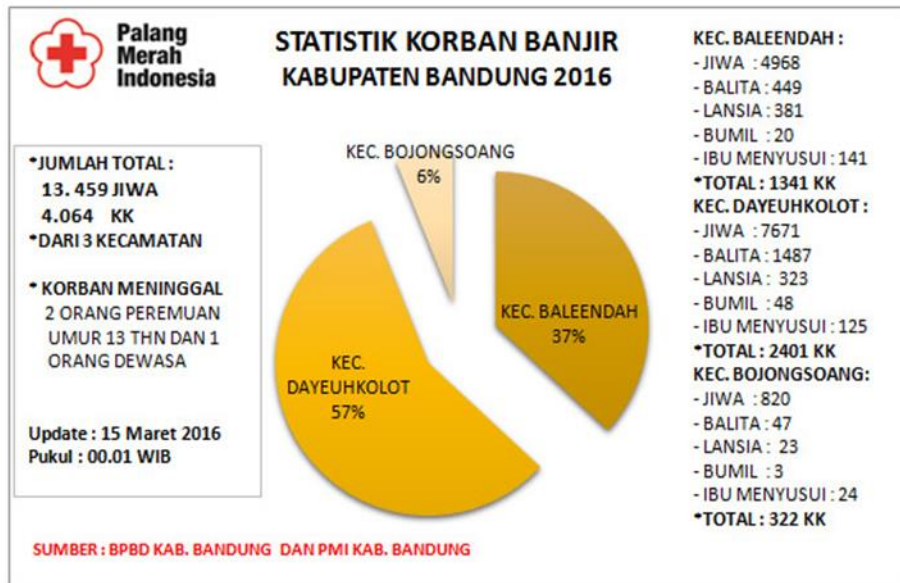
## TEMUAN DAN HASIL

Sinergi TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam, merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagai negara yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang tertinggi di dunia, Indonesia harus siap menanggulangi bencana. Besarnya potensi bencana alam yang terjadi, jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan krisis di daerah. Bahkan dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara. Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan serta melibatkan komando permanen (komando gabungan) dan komando bentukan (Komando tugas gabungan). Kampanye militer terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Munculnya OMSP dalam kampanye militer di Indonesia lahir dari proses sejarah panjang TNI sebagai pejuang rakyat dimana TNI selalu hadir bersama rakyat, memperjuangkan kemerdekaan dan mengisinya dengan memberikan Dharma Bhakti-nya untuk kepentingan rakyat dan negara. Operasi bantuan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 ayat 3c UU Nomor 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara dapat diwujudkan pula dalam bentuk kegiatan, seperti yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Negara, yaitu bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi bencana alam. Posisi geografis dan geologis Indonesia, yang terletak pada pertemuan lempeng bumi Indo-Australia, Eurosia dan Pasifik serta terletak pada jalur cincin api Pasifik dimana di negara kita terdapat 240 gunung api dengan kondisi terakhir 19 gunung waspada sangat rawan terhadap bencana alam yang berupa gempa vulkanik dan tektonik, tsunami, banjir, serta tanah longsor (Buku Putih Pertahanan, 2008, Hal.14). Keberadaan negara kita sebagai wilayah yang rawan bencana tersebut membutuhkan kesiapan dan ketanggapan dalam penanggulangan bencana. Dalam setiap penanggulangan bencana TNI-AD termasuk didalamnya prajurit Kodim selalu aktif berada di barisan terdepan bersama dengan komponen masyarakat lainnya.

Penggunaan kekuatan tempur dilakukan bersama dengan institusi/organisasi lain yang memiliki jalur pertanggung jawaban dan tata kerja yang berbeda dari hierarki militer, walaupun belum terdapat kebijakan strategis yang mengaturnya. Keberadaan kebijakan ini penting dalam keterlibatan TNI pada operasi bantuan kemanusiaan yang seharusnya tidak lagi semata-mata atas keterpanggilan dan kepedulian serta budaya yang selalu ada di depan semata, melainkan atas dasar permintaan dan peraturan perundangan yang berlaku. TNI tidak pernah absen dalam membantu penanggulangan bencana banjir yang terintegrasi dengan institusi lainnya sebagai manifestasi tugas Operasi Militer Selain Perang, begitu juga yang dilakukan oleh TNI dalam penanggulangan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.

Diagram 1. Statistik Korban Banjir di Kabupaten Bandung Tahun 2016



Sumber: <https://www.pmikabbandung.or.id>, 2021

Strategi yang dilakukan oleh TNI (dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kodim Bandung pada operasi penanggulangan bencana banjir, diantaranya secara bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menggalang semua kekuatan TNI yang ada di sekitar wilayah Bandung Raya diantaranya Batalyon Zeni Tempur-3 Dayeuh Kolot, Kopaskhas TNI-AU yang berada di Lanud Sulaeman, Lanal Bandung serta aparat kewilayahan lainnya untuk bersinergi dan membantu dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir. Namun demikian pelaksanaan operasi penanggulangan banjir yang dilakukan oleh TNI terkesan parsial dimana masing2 satuan berdiri sendiri, sehingga tidak terbentuk suatu mekanisme operasi gabungan TNI yang terintegrasi di bawah satu komando dan pengendalian Kodim Bandung. Demikian pula halnya dengan Protap bersama penanggulangan bencana di wilayah yang sampai saat ini belum tersusun secara formal antara Kodim dan Pemerintah Daerah/BPBD, padahal tugas dan keterlibatan semua satuan TNI maupun instansi terkait serta organisasi serta relawan-relawan yang terlibat penanggulangan bencana sangat penting. Sehingga kondisi nyata di lapangan, operasional pasukan tidak maksimal dan strategi penanggulangan bencana terkadang tidak optimal.

Kodam dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir di wilayah tanggung jawabnya berpedoman kepada UU RI No 34 tahun 2004 tentang TNI yang dijabarkan kedalam Rencana Kontijensi (Renkon) Kodam dalam melaksanakan OMSP. Selanjutnya Korem dan Kodim menjabarkan kedalam protap satuan. Namun kesemuanya itu belum optimal dalam menjawab persoalan di lapangan khususnya dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi bersama-sama dengan matra/angkatan lainnya, BPBD serta instansi terkait lainnya. Koordinasi dan kerjasama di lapangan dapat dilaksanakan antar instansi dan stake holder yang ada di wilayah sehingga pelaksanaan penyelamatan dan bantuan kemanusiaan dapat dilaksanakan karena bencana banjir terjadi hampir setiap tahun meskipun belum ada protap bersama. Terintegrasinya *pengendalian*, dan koordinasi merupakan syarat dalam mewujudkan keberhasilan tugas operasi baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) seperti halnya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung. Penanggulangan bencana merupakan tugas pokok TNI yang termasuk dalam OMSP yang kemudian diperjelas dalam Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) yang ditetapkan



berdasarkan Keputusan Panglima TNI No.Kep/2/1/2007. Doktrin ini mengatur tentang penggunaan kekuatan TNI berdasarkan prinsip-prinsip OMSP yaitu dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan dan Operasi dalam rangka membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).

Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung, setiap tahunnya senantiasa melibatkan TNI terutama pada fase mitigasi dimana mitigasi merupakan tindakan meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia, sehingga kerugian jiwa dan material serta kerusakan yang terjadi dapat segera diatasi melalui upaya mitigasi, yang meliputi kesiap-siagaan (*preparedness*) serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan. Usaha mitigasi untuk mencegah bahaya dari pembangunan menuju bencana semuanya, atau untuk mengurangi efek bencana ketika terjadi. Fase mitigasi berbeda dari fase yang lain sebab fase ini fokus pada tindakan jangka panjang untuk mengurangi atau mengeliminasi resiko. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bantuan kemanusiaan dilaksanakan secara terpadu BPBD, TNI, Polri dan relawan serta stakeholder terkait yang ada di wilayah.

**Tabel 2. Kegiatan dalam Siklus Penanggulangan Banjir**

Siklus	Kegiatan
PENCEGAHAN ( <i>Prevention</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upaya - upaya Struktural<ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya di dalam badan Sungai (<i>In-Stream</i>)</li><li>- Upaya di luar badan Sungai (<i>Off-Stream</i>)</li></ul></li><li>• Upaya - upaya Non-Struktural<ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya Pencegahan Banjir Jangka Panjang</li><li>- Upaya Pengelolaan Keadaan Darurat Banjir dalam Jangka Pendek</li></ul></li></ul>
PENANGANAN ( <i>Intervention/ Response</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberitahuan dan Penyebaran Informasi Prakiraan Banjir</li><li>• Reaksi Cepat dan Bantuan Penanganan Darurat Banjir</li><li>• Perlawanan terhadap Banjir</li></ul>
PEMULIHAN ( <i>Recovery</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Segera Kebutuhan Hidup Sehari-hari dan Perbaikan Sarana dan Prasarana<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembersihan dan Rekonstruksi Pasca Banjir</li><li>- Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Fisik dan Non-Fisik</li></ul></li><li>• Penilaian Kerusakan/Kerugian dan Asuransi Bencana Banjir</li><li>• Kajian Penyebab Terjadinya Bencana Banjir</li></ul>

Sumber: Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat – UI, [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), 2021

Selanjutnya Binkomsos dilakukan oleh Kodim dan instansi TNI lainnya juga seluruh komponen daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sosialisasi dan penyuluhan serta kegiatan lainnya tentang pentingnya penanggulangan bencana alam yang diarahkan kepada komponen masyarakat. Pada konteks ini komunikasi sosial dibina dengan Komponen masyarakat antara lain Toga, Tomas, Enterpreneur, dan lain lain untuk membangun hubungan emosional yang positif, memelihara dan meningkatkan serta memantapkan keeratan hubungan antara prajurit/satuan dengan masyarakat sehingga timbul keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung usaha-usaha dalam menanggulangi bencana banjir yang kerap kali terjadi setiap tahunnya.

Masyarakat menyambut baik kegiatan ini, apalagi setiap kali dilaksanakannya kegiatan ini selalu ada bantuan nyata dari TNI sebut saja misalkan bahan makanan, alat pelampung dan lain sebagainya yang sedikitnya dapat meringankan penderitaan korban Banjir. Selain dengan kalangan masyarakat, komunikasipun dilaksanakan dengan *Pemerintah Daerah*. Sehingga terbangun pemahaman yang positif tentang strategi operasi dibawah komando Dandim dalam rangka usahanya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian

bantuan kemanusiaan sehingga terwujud sinergitas dan kerja sama yang erat dari aparat/instansi pemerintah dalam rangka mendukung tercapainya tujuan bersama dalam rangka mitigasi bencana alam; *Ketiga, Keluarga Besar TNI (KBT)*. Membina Komunikasi Sosial dengan KBT untuk meningkatkan, memelihara hubungan emosional serta pemantapan hubungan antara Prajurit/satuan dengan KBT dalam rangka memberikan pemahaman dan pola pikir kesadaran masyarakat waspada bencana alam.

Sedangkan usaha Bhakti TNI dilakukan oleh TNI dengan penyelenggaraan operasi bhakti dan karya bhakti dalam rangka pencegahan bencana seperti pengerukan sungai citarum. Kodim mampu memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PB yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi BPBD mengirimkan Satuan PRC PB tingkat Kodim yang terdiri dari unsur kesehatan, intelejen, perhubungan/komunikasi dan tim evakuasi serta mengarahkan satuan PRC PB tingkat Korem ke daerah bencana. Kemudian setelah itu Kodim memberikan bantuan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis serta pendistribusian bantuan obat-obatan, pakaian dan bahan makanan. Kemudian tidak lupa dengan metoda Binkomsos maka aparat kewilayahan yang ada di Kodim memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat yang terkena bencana. Dandim juga melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Danrem/ Satkorlak/Satlak agar selalu dapat dimonitor dan diketahui perkembangannya oleh satuan atas. Sedangkan Bhakti TNI dilakukan dengan karya bhakti yang melibatkan seluruh unsur TNI di wilayah yang dikoordinir oleh Kodim dalam rangka mengurangi dampak bencana bagi masyarakat korban bencana.

Pada tingkat Koramil kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pertolongan pertama (evakuasi) kepada korban bencana, menyiapkan tempat dan dapur umum serta Rumah Sakit lapangan, Menyiapkan tempat penampungan/pengungsian sementara bagi korban bencana (balai desa, balai Kecamatan, Sekolah-sekolah, Gudang-gudang dll). Mengamankan daerah yang terkena bencana. Menginventarisir, menerima menyalurkan bantuan dan mempertanggungjawabkan bantuan-bantuan yang diterirna serta melaporkannya kepada Dandim dan BPBD.

Upaya penanganan bencana dibagi dalam tahapan pra bencana, saat terjadi bencana dan paska bencana. Penanganan dalam tiap tahapan bencana tersebut melibatkan seluruh departemen atau instansi terkait sesuai bidangnya, adapun peranan TNI dalam penanganan bencana adalah bahwa Dalam konteks pencegahan dan mitigasi, TNI tidak disiapkan untuk hal tersebut, tetapi dilibatkan sebagai pendukung untuk sosialisasi dan peringatan dini; Dalam konteks penanggulangan, TNI harus disiapkan untuk dapat menangani dampak bencana pada tanggap darurat; Dalam konteks pemulihan, TNI dapat disiapkan sesuai kebutuhan. Jadi jelaslah bahwa peran TNI yang paling dominan adalah pada tahapan tanggap darurat. Adapun kegiatannya meliputi: Pencarian dan Penyelamatan Korban; Bantuan Darurat Kemanusiaan berupa makanan, pakaian dan shelter; Layanan kesehatan termasuk trauma psikologis; dan Sanitasi dan kesehatan lingkungan

Selanjutnya untuk melihat aktivitas kampanye militer OMSP dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung pada Mitigasi dapat dilihat dari pentahapan pada setiap pelaksanaan kegiatan dimasa pasca bencana. *Tahap pertama, kegiatan pemulihan kondisi mental masyarakat.* Disini TNI dalam hal ini Kodim dengan satuan lainnya menyiapkan pendataan masyarakat korban bencana alam yang terbagi menjadi jenis kelamin, penyakit dan umur, kemudian secara bersama-sama mencari solusi dan menanganinya sesuai dengan prosedur dan kapasitas satuan-satuan yang tergabung dalam operasi penanggulangan bencana dimaksud.



## KESIMPULAN

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah melalui Strategi Kampanye Militer dalam operasi penanggulangan bencana banjir di wilayah Kabupaten Bandung senantiasa berprinsip pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pada tataran operasional, tugas tersebut dijabarkan dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) melalui Strategi kampanye militer pada penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung yang senyatanya belum terlaksana sesuai sepenuhnya sesuai dengan strategi kampanye militer karena penggunaan kekuatan tempur dilakukan bersama dengan institusi/organisasi lain yang memiliki jalur pertanggung jawaban dan tata kerja yang berbeda dari hierarki militer yang belum terdapat kebijakan yang mengaturnya.

Sinergi TNI dan Pemerintah daerah pada konteks ini dilakukan oleh TNI (dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kodim Bandung) pada operasi penanggulangan bencana banjir, secara bersama-sama dengan BPBD Kabupaten Bandung dengan menggalang semua kekuatan TNI yang ada di sekitar wilayah Bandung Raya diantaranya Batalyon Zeni Tempur-3, Kopaskhas TNI-AU yang berada di Lanud Sulaeman, Lanal Bandung serta aparat kewilayahan lainnya untuk bersinergi dan membantu dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Michael dan Kaye, Jude, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Obor Indonesia
- Agus Prastowo 2012, *Metode Penelitian Kualitatif. Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*
- Ardhanariswari, Dwi dan Yandry K Kasim (ed.). 2008. *Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Aktor, Regulasi dan Mekanisme Koordinasi*. Cetakan Pertama Juni. Jakarta: Pacifis
- Al Maskat., Abdul Manan M. 1985. *National Security in the third world*. Boulder. Col : westview press
- Creswell, John W. 2010. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- E.A. STEPANOVA, *Candidate Of Historical Sciences From The Archives Of Military Operations Other Than War (The U.S. View) No. 2, 2002. Pages: 127-132. Military Thought A Russian Military Theory And Strategic* diunduh tanggal 31 Maret 2015
- H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Hal 91-93.
- US Guide to Military Operation Other Than War, Tactics, Techniques & Prosedur for Stability & Support Operation, Domestic & International* yang ditulis oleh LTC Keith E. Bonn, USA (Ret.) dan MSG Anthony E. Baker, USA (Ret.) *US Joint Doctrine for Campaign Planning* 25 January 2002 (Chapter 1)
- IDSPS. 2008. *Kebijakan Umum Keamanan Nasional. Policy paper*. Jakarta : IDSPS September 2008
- Jayaraman, V., Panduan, Jr., V., dan Srivastava, R. (1999). *Sebuah loop tertutup Model logistic untuk remanufaktur*. *Journal Society Riset Operasional*, 50 (5): 497-508

### **Dokumen dan Sumber Lain**

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang RI No 24 tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana

Republik Indonesia, 2007 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah RI No Perpang/13/III/2008 tanggal 27 Maret 2008

Kementerian Pertahanan RI. Buku Putih Pertahanan tahun 2008

Mabes TNI, 20013 Skep Panglima TNI Nomor/Kep/265/tanggal 5 April 2013.

Naskah Sementara Peraturan Panglima TNI No 14/III/2008 tentang Bujukin Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain perang.

James Panjaitan. Institut Teknologi Bandung , 2008 Konsepsi Pelibatan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus : Operasi Bhakti TNI Pasca Bencana Gempa di Nias, 2005).

*Mirtusin, 2012 Universitas Indonesia, dalam tesisnya berjudul “Tugas Pertahanan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan NKRI*

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat – UI, [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), 2021

<https://www.pmikabbandung.or.id>, 2021

[http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp5\\_00\\_1\(02\)](http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp5_00_1(02))